

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai kebudayaan, bahasa, tatanan sosial, tatanan budaya yang berbeda. Meski demikian banyak persamaan-persamaan yang terdapat dalam kebudayaan tersebut. Hal ini disebabkan karena latar belakang sejarah, geografis dan kepercayaannya yang berbeda-beda. Meski demikian, setiap suku bangsa di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai.

Banyaknya budaya di Indonesia ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi negara kita, tetapi juga bisa menjadi sebuah malapetaka dan sumber dari disintegrasi bangsa ketika setiap perbedaan yang ada di Indonesia menjadi sumber perselisihan. Hal ini terbukti ketika tahun 1998 – 2000 terjadi kerusuhan di Poso yang diakibatkan perselisihan antara warga Muslim dan Warga Kristiani. Selain itu, catatan kelam di Indonesia juga terjadi pada tahun 2001 yang terjadi di Sampit yang diakibatkan perbedaan antara warga Dayak asli Kalimantan Selatan dengan warga yang berasal dari Madura.

Dari dua peristiwa yang dipaparkan di atas, Bangsa Indonesia tentu tidak mau kembali terperosok dalam lubang hitam yaitu kerusuhan atau perang saudara, karena sesuai dengan semboyan negara kita “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang artinya berbeda tapi tetap satu. Untuk tetap menjaga kerukunan diantara perbedaan yang ada di Indonesia dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan rakyat dalam menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa indikator dalam menjaga kerukunan dan keutuhan Negara Indonesia dalam era demokrasi ini baik itu dalam aspek sosial, politik, dan kebudayaan, diantaranya sosok pemimpin yang tegas dan mampu mensejahterakan rakyat. Hal tersebut dikarenakan pada era modernisasi ini tidak hanya berdampak pada tatanan teknologi dan pengetahuan alam dalam

kehidupan sehari-hari, tetapi berimbas pada pola pandang bangsa Indonesia terhadap politik dan pemerintahan. Sebagai contoh pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran dalam menurunkan rezim orde baru yang telah berkuasa kurang lebih 32 tahun. Peristiwa tersebut memberikan banyak efek positif bagi berbagai aspek diantaranya adanya otonomi daerah yang dimaksudkan agar pembangunan di Negara Indonesia lebih merata, pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan adanya kebebasan untuk berpendapat dan berpolitik yang sebelumnya merupakan sesuatu yang dikekang.

Setelah satu dekade berlangsungnya era reformasi Indonesia hingga kini sedang mengalami krisis kepemimpinan sehingga semakin sulit ditemukannya figure-figur pemimpin teladan yang dapat menjadi panutan bagi generasi muda. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan para pemimpin Indonesia di seluruh daerah. Budaya korupsi sudah mewabah layaknya virus yang sulit divaksinasi sehingga merusak dan menggerogoti sendi-sendi berbangsa dan bernegara di berbagai pelosok nusantara baik pemerintahan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Fenomena krisis pemimpin ini nyata-nyata juga telah membentuk pemahaman di masyarakat bahwa tidak ada lagi birokrasi di bumi pertiwi Indonesia yang tidak digerogeti virus korupsi ini. Maraknya kasus korupsi menjadi ciri betapa buruknya karakter pemimpin pada bangsa ini.

Dalam keadaan demikian maka kita membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa dan mengawal perubahan bagi masyarakat. Pemimpin saat ini tidak mungkin hanya bersandar pada kharisma baik dari bawaan atau pun karena peran sejarah. Kelebihan seorang pemimpin dapat diukur dari prestasi nyata dan kualitas pemikirannya. Selain itu, pemimpin saat ini di era modern ini diperlukan pemimpin yang demokratis, karena kehidupan demokratis saat ini dijunjung tinggi pada era modern.

Namun untuk menghadirkan pemimpin yang demokratis bukanlah perkara yang mudah, karena masyarakat yang semakin terbuka, dan kebebasan

menjadi ciri masyarakat demokrasi diperlukan untuk mengembangkan kreativitas dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan yang dipandanginya tepat walaupun terkadang tidak mendapat dukungan rakyat banyak. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin diperlukan kearifan untuk menentukan mana yang terbaik dan juga memiliki tingkat pemahaman teknis, agar keputusan yang menyangkut implikasi dan kompleks tidak diambil semata-mata atas dasar instuisi, tetapi dengan dasar pengetahuan dan perhitungan yang matang.

Saat ini penguasa semakin terlena dengan kekuasaannya, oleh karena itu banyak yang berlomba-lomba untuk mengamankan posisi dalam kekuasaan. Berbagai cara dihalalkan untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai kebudayaan Bangsa Indonesia yang sejatinya bergotong royong dan bersatu dalam menciptakan kemajuan bangsa.

Kehidupan berpolitik Indonesia diwarnai oleh pemikiran politik yang banyak dilandasi pemikiran Barat yang lebih cenderung sekuler. Pertarungan politik pun telah melupakan seluruh pondasi nilai-nilai ketimuran yang kita miliki. Warisan kebudayaan lokal yang sarat dengan nilai dan norma hampir menjadi barang yang langka dan dilupakan oleh para aktor politik di Indonesia. Suasana inilah berimbas kepada politisi lokal, termasuk para elit politik Sunda yang berada di Jawa Barat. Padahal dalam budaya Sunda terdapat serentetan norma dan nilai yang bisa dijadikan landasan bagi aktivitas politik.

Oleh karena itu, sebagai penawar kekisruhan politik yang terjadi saat ini, nilai-nilai kebudayaan lah yang bisa menjadi alternatif pemecahan masalah sebagai filterisasi dari pengaruh pemikiran barat yang tidak baik. Karena kebudayaan dan politik tidak bisa dipisahkan dan keduanya berkaitan, hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Budimansyah dan Suryadi (2008: hlm. 126) “beberapa perwujudan kebudayaan adalah produk politik. Lebih karena itu, ketika masalah-masalah politik muncul kebudayaan akan hadir sebagai salah satu rujukan dalam menemukan cara pemecahan masalah”. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan politik saat ini bisa

diselesaikan oleh nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal sehingga dengan munculnya kembali nilai-nilai kearifan sebagai identitas akan memberikan setidaknya penawar bagi kekisruhan politik yang terjadi saat ini.

Sunda sebagai sebuah entitas budaya lokal terbesar kedua di Indonesia setelah budaya Jawa mempunyai seperangkat nilai-nilai atau norma-norma dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari mulai norma agama, politik, hokum, sosial dan ekonomi hingga pada persoalan kehidupan lainnya. Khusus bidang politik, Sunda pun mempunyai norma-norma sebagai warisan dari budaya leluhurnya. Sejarah telah membuktikan, banyak tokoh-tokoh Sunda yang menjadi politisi dan berhasil menjadikan rakyat sejahtera, aman dari ancaman, seperti halnya Pangeran Kornel, Dipati Ukur, Otto Iskandar Dinata dan yang lainnya merupakan tokoh-tokoh Sunda yang telah menjadikan norma budaya lokal sebagai dasar bagi perjuangannya. Secara umum, masyarakat Sunda sering dikenal dengan masyarakat yang religius. Pada kebudayaan Sunda, keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial di masyarakat Sunda dilakukan dengan cara gotong royong.

Masyarakat Sunda memiliki sejumlah nilai moral budaya yang terdapat dalam wujud kebudayaan Sunda. Menurut Ekajati (1995: hlm. 62) “nilai moral budaya Sunda merupakan jati diri etnik Sunda yang bersumber pada nilai, kepercayaan, dan peninggalan budaya Sunda yang menjadikan acuan dalam bertingkah laku. Seakan kehilangan Identitas Kesundaannya, pemahaman identitas Sunda tersebut hanya terbatas dari properti yang mereka pakai. Banyak kepala daerah, calon legislatif dan elit politik yang ada di Jawa Barat pada saat kampanye ataupun sudah menjadi Bupati/Walikota menjadikan Kesundaannya sebagai ciri khas dan daya tarik untuk menggaet konstituen dan memperkenalkan bahwa mereka sebagai orang Sunda dan menjunjung tinggi nilai Kesundaan. Namun itu terkesan hanya sebagai pencitraan saja. Menurut Sumardji (2011: hlm. 15) “identitas bukan terletak pada wujud-wujud

bendanya, hasil kerjanya, tetapi bagaimana dia bekerja mengoprasionalkan dirinya dalam menanggapi kehidupan ini”.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik benang merah bahwa ketika kita membawa identitas kesundaan dalam politik, maka ada nilai-nilai kesundaan yang harus kita jadikan koridor-koridor dalam bertindak. Bukan hanya aksesoris yang kita pakai, kebijakan atau hasil kerja yang bernilai kesundaan namun pada prosesnya harus senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai kesundaan. Dalam persepsi kesundaan memperbincangkan kekuasaan dianggap hal yang tabu karena kekuasaan cenderung berkaitan dengan keserakahan. Oleh karena itu, ada falsafah Kesundaan “*Caina Herang Laukna Beunang*” yang berarti mendapatkan sesuatu tanpa menyakiti orang lain. Selain itu *silih asah, silih asih, silih asuh* yang berarti bersama-sama saling menjaga, mencintai, dan mengayomi.

Ungkapan di atas merupakan cerminan bahwa masyarakat Sunda yang mempunyai budaya politik cenderung defensif. Dalam mencapai kekuasaan atau pemimpin maka orang Sunda lebih cenderung menunggu. Mereka lebih memilih untuk ditunjuk atau diajukan oleh orang lain dibandingkan dengan mengajukan diri sendiri untuk dipilih karena telah memenuhi segala persyaratannya. Hal tersebut bukan berarti kebanyakan orang Sunda tidak mempunyai nyali atau tidak percayadiri, namun, hal tersebut merupakan bentuk bahwa orang Sunda itu menawarkan Kepercayaan dengan kemampuan yang dimilikinya. Kebudayaan lokal Sunda relatif beranekaragam sebagai salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai kekayaan nasional. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenaran dan kesakralannya serta menjadi pegangan hidup anggotanya yang diwariskan secara turun temurun dan saling terkait kedalam sistem. Pada masyarakat adat memiliki kesetiakawanan sosial, gotong royong, musyawarah, dan kerukunan yang melekat kuat dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat heterogenitas, aktivitas, dan pertumbuhan ekonomi

lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pandangan hidup orang Sunda seperti, *sareundeuk saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak* dan *sabilulungan*, (selalu bekerjasama dalam mengerjakan segala hal, dan selalu bermusyawara dalam mengambil keputusan)

Berdasarkan sifatnya, kearifan lokal Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat Sunda adalah ramah tamah (*someah*), murah senyum, lemah lembut, penyayangan, patuh dan menghormati orang tua. Itulah cermin budaya masyarakat Sunda. Sehingga ketika mendengar masyarakat Sunda, maka akan terlintas bahwa orang Sunda adalah sosok yang lemah lembut, penyayang, ramah dan sopan santun. Dalam kebudayaan Sunda terdapat nilai moral budaya yang merupakan jati diri etnik Sunda yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku. Ekajadi (1995: hlm 62) “dalam kajian akademik, nilai-nilai moral dipandang sebagai konsep kearifan lokal yang merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh dalam wilayah di mana komunitas itu berada”.

Dari pernyataan itu maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang ditransformasikan diambil dari pandangan hidup orang Sunda, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan dengan maksud untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki jatidiri Kesundaan untuk membangun warganegara Indonesia yang berfikir dan bertindak global tetapi tetap menjunjung tinggi adat tradisi sebagai pegangan hidup. Pemimpin yang cerdas dan baik tidak hanya dalam lingkup nasional saja, tetapi harus berakar pada pemimpin daerah baik itu provinsi ataupun kota-kabupaten. Karena dalam sistem desentralisasi saat ini, pemerintah daerah menjadi ujung tombak dari kebijakan pelayanan publik dalam berbagai bidang.

Sebenarnya isu dari kepemimpinan Sunda sudah menjadi wacana sejak lama, namun kembali menyeruak lagi dikarenakan banyak politisi yang kurang

berprestasi dalam kancah nasional. Ada beberapa permasalahan seperti yang diungkap oleh Darmawan dalam Harian Pikiran Rakyat tanggal 26 Februari 2005, diantaranya kemiskinan kultural yakni lemahnya nilai-nilai kebudayaan Sunda dalam kehidupan sehari-hari dan kemiskinan personal yang berkaitan dengan paradigma berfikir, daya juang dan popularitas orang Sunda yang masih bersifat lokal.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, mengungkapkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggota DPRD baik itu provinsi ataupun kota/kab mempunyai fungsi yang sama yaitu pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagai representasi dari rakyat. Oleh karena itu, anggota dewan merupakan elit politik yang berada di daerahnya masing-masing, hal tersebut dikarenakan elit politik adalah orang-orang yang mempunyai jabatan dalam sistem politik dalam penentu kebijakan ataupun sebagai pengawas kebijakan, hal tersebut menjadi beban kepada anggota dewan karena dalam menjalankan fungsi tersebut sering dinilai bahwa anggota dewan belum mempunyai kapasitas dan kfabilitas. Hal itu dikarena sebagian dari anggota dewan mempunyai latar belakang pendidikan dan lingkungan yang kurang terutama dalam pendidikan politiknya. Selain itu, tuntutan zaman yang memang mengharuskan setiap anggota dewan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi Jawa Barat. Sebagaimana fungsi dan kewenangannya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat harus menjalankannya sebagai representasi dari rakyat.

Seperti diungkapkan sebelumnya, Rakyat Jawa Barat yang sebagian besar merupakan Suku Sunda yang senantiasa mempunyai pegangan hidup terhadap tradisi dan nilai-nilai Kesundaan. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan ketika kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintahnya mengindahkan nilai-nilai Kesundaan.

Kebijakan yang dibuat oleh anggota DPRD Jawa Barat memang bukan cerminan dari perilaku politik etnis Sunda secara keseluruhan, sebab tidak semua anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan etnis Sunda, dan tidak semua anggota dewan yang merupakan etnis sunda yang mengerti tentang nilai-nilai Kesundan. Namun, kebijakan, cara komunikasi, dan perilaku sebagian besar politisi Sunda adalah cerminan perilaku kepemimpinan yang menjadi representasi nilai-nilai Kesundaan dalam kepemimpinan.

Masalahnya seperti diungkap di atas adalah banyak politisi yang berasal dari Sunda menjadikan budaya Sunda menjadi identitasnya. Namun yang terjadi adalah identitas Sunda yang dipakai hanya sebatas aksesorin dan ritual-ritualnya saja. Sementara nilai-nilai yang menjadi pedoman hidupnya tidak dipakai, padahal kita ketahui dari dulu nilai-nilai kesundaan itu tidak berbenturan dengan ajaran agama terlebih agama Islam. Adapun beberapa ritual yang berbenturan dengan Islam bisa kita minimalisir dan mengakulturasi tanpa menghilangkan esensi budaya dan menyalahi syariat Agama Islam.

Walaupun demikian peneliti menganggap pentingnya peran nilai kepemimpinan Sunda dalam membentuk perilaku elit politik sebagai penguat karakter yang diteliti, karena jiwa kepemimpinan yang bersih dan berakarkan

budaya akan menyelamatkan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Barat Khususnya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Prof. Ganjar Kurnia “Arti Sunda dalam Bahasa Kawi yaitu subur, banyak tersedia air, berkualitas dan waspada. Bahkan, kata ‘su’ dalam Sunda bermakna segala hal yang baik,” ungkap Rektor Unpad di hadapan para Calon Anggota Legislatif Jawa Barat saat membuka Keurseus Dasar Kabudayaan Sunda ke-7, Selasa (28/11/2013) di Bale Rumawat Unpad Kampus Iwa Koesoema Soemantri Bandung.

Oleh karena itu yang menjadi masalah adalah ketika kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah jauh dari nilai-nilai Sunda, maka efeknya akan terjadi kerugian, baik itu terhadap rakyat Jawa Barat ataupun terhadap lingkungan alam Tatar Sunda. Dalam penggalian dan pencarian nilai-nilai kepemimpinan Sunda, sebenarnya Masyarakat Sunda sudah terbiasa dengan-cerita-cerita rakyat yang didalamnya terdapat nilai-nilai kepemimpinan sunda. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat Sunda lebih bisa memilah mana yang baik dan mana yang bisa dijadikan pedoman dalam tindakan keseharian kita.

Dari paparan permasalahan di atas terkait dengan perilaku elit politik orang Sunda, maka perlu dikaji sejauh mana nilai-nilai Kesundaan yang menjadi dasar berperilaku dan beraktifitas elit politik yang berada di DPRD Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan DPRD Jawa Barat mempunyai fungsi Membentuk Perda, Anggaran dan Mengawasi Gubernur beserta jajarannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan judul **“PERAN NILAI KEPEMIMPINAN SUNDA DALAM MEMBENTUK PERILAKU ELIT POLITIK MELALUI *CITIZENSHIP EDUCATION* (Studi Deskriptif di DPRD Provinsi Jawa Barat)”**. Sehingga, pada akhirnya timbul kesadaran secara karakter dan bahkan menjadi watak yang melekat sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas dalam menentukan kebijakan yang berlandaskan atas nilai-nilai Kesundaan yang melekat pada perilaku politik Orang Sunda sehingga

dapat mengangkat harkat, derajat, dan martabat Ki Sunda guna perkembangan Bangsa Indonesia

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dijadikan beberapa rumusan masalah untuk diteliti diantaranya :

1. Bagaimana kekuatan karakter Kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Kesundaan?
2. Bagaimana peran nilai-nilai kesundaan dalam membentuk karakter dan prilaku politik Elite Politik Sunda?
3. Bagaimana proses yang dilakukan elite politik Sunda di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menggali dan menerapkan nilai-nilai Kesundan dalam konteks *Citizenship Education*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara seksama tentang bagaimana peran nilai kepemimpinan sunda dalam membentuk perilaku elit politik di DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai penguatan karakter. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Kekuatan Karakter Kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Kesundaan
2. Peran nilai-nilai kesundaan dalam membentuk karakter dan prilaku politik Elit Politik Sunda
3. Proses yang dilakukan elit politik Sunda di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menggali dan menerapkan nilai-nilai Kesundan dalam konteks *Citizenship Education*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai *Politik Sunda dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Politisi Sunda* pada Mata kuliah Ilmu Politik, Pendidikan Politik, Sosiologi Politik dan Pendidikan Karakter di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berarti dan berguna bagi peningkatan penelitian *Politik Sunda dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Politisi Sunda* terutama:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai penguat karakter politisi etnik Sunda, khususnya nilai-nilai budaya politik Sunda.
- b. Bagi DPRD, penelitian ini berguna untuk membantu setiap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat sebagai evaluasi dan Referensi dalam mengembangkan diri sebagai politisi asli Sunda.
- c. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini berguna sebagai referensi dalam kajian keilmuan di jurusan khususnya yang berkaitan dengan budaya politik, pendidikan politik, ilmu politik dan pendidikan karakter.

D. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini terdiri dari lima bab yang tersusun dari bab I sampai bab V, antara lain bab I mengenai pendahuluan, bab II mengenai tinjauan pustaka, bab III mengenai metode penelitian, bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan bab V mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

Bab I mengenai pendahuluan. Pada bagian bab ini secara rinci dikaji mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II mengenai kajian pustaka. Pada bagian bab ini secara rinci dikaji mengenai kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang dijadikan pisau analisis pada bagian pembahasan, teori tersebut antara lain: (1) Kepemimpinan, (2) kajian tentang nilai-nilai kearifan lokal sunda, (2) kajian tentang karakter, (3) kajian tentang politik, (4) Kajian tentang citizenship education.

Bab III mengenai metode penelitian. Pada bagian bab ini secara rinci akan dikaji mencakup lokasi dan partisipan penelitian, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

Bab IV mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini akan dikaji secara rinci mengenai deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V mengenai kesimpulan dan saran. Pada bab ini dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) simpulan, (2) implikasi dan (3) rekomendasi.